

### BAB III

## KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN DAN DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA

### A. Konflik di Laut China Selatan

Laut China Selatan memiliki peran penting dalam kelangsungan perekonomian dunia, menjadi 30% bagian jalur perdagangan dunia, setidaknya dalam setahun nominal nilai perdagangan yang melalui jalur ini adalah sebesar 5 miliar USDollar atau setara 67.567 triliun Rupiah. Wilayah ini juga memiliki cadangan gas alam dan minyak bumi yang sangat signifikan, sebanyak 11 juta barrel minyak bumi dan 190 miliar kaki kubik gas alam tersedia dibawah Laut China Selatan.(Ma, 2016)

Melihat begitu strategisnya kawasan Laut China Selatan, maka tidak mengherankan banyak negara-negara yang bersengketa atas wilayah yang sangat penting keberadaannya tersebut. Banyak konflik yang terjadi dalam persengketaan wilayah tersebut, berikut *timeline* dari konflik-konflik tersebut;

1947: Republik China pertama kali mempublikasikan peta *nine-dash line* pada masa pemerintahan Chiang Kai-Sek. Garis itu membentang diatas seluruh kawasan Laut China Selatan, mencakupi wilayah laut Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Oktober 2011: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, memulai program "*pivot to Asia*" yang memiliki tujuan untuk memfokuskan hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan kawasan-kawasan Asia.

Februari 2012: Hong Lei, Menteri Luar Negeri China, menyatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang mengklaim wilayah Laut China Selatan seutuhnya, berlawanan dengan fakta bahwa *nine-dash line* yang dimiliki China hampir mencakup seluruh wilayah Laut China Selatan

Maret 2012: China menangkap 21 nelayan Vietnam yang sedang melaut di kawasan Kepulauan Paracel dan mengatakan bahwa para nelayan tersebut telah memasuki kawasan perairan

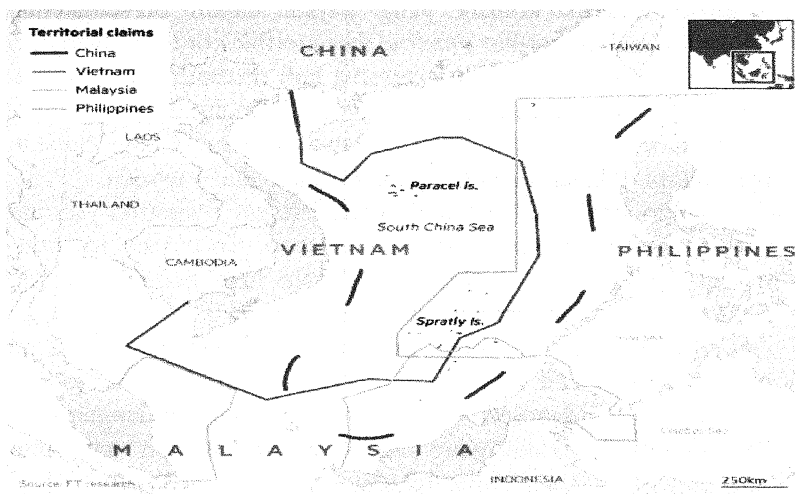
milik China, padahal kawasan tersebut masih berada di wilayah laut internasional.

April 2012: Filipina menemukan ada kegiatan yang dilakukakn oleh China dikawasan pulau Scarborough. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal dimana China melakukan pemanenan terumbu karang dan biota laut secara besar-besaran.

Juni 2012: Vietnam mendapatkan hak atas wilayah kepulauan Paracel dan Spratly, China menentang klaim tersebut, namun masih dalam sengketa tersebut masih sebatas dalam lingkup wilayah prefektur.

September 2012: Presiden Filipina Benigno Aquino secara resmi menamakan kawasan wilayah laut barat Filipina menjadi Laut Filipina Barat.

Desember 2012: China mengajukan klaim wilayah Laut China Selatan kepada UN. Didalam klaim tersebut China juga memasukkan wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu yang baru saja dibeli dari Jepang



**Figure3.2 Klaim Teritorial Negara-Negara di Laut China Selatan**

Januari 2013: Filipina secara resmi mengajukan arbitrase atas klaim China di Laut China Selatan ke *International Tribunal for the Law of the Sea* di Den Haag, Belanda. China menolak untuk mengikuti persidangan.

April 2013: Vietnam mengungkapkan pada media bahwa sebuah kapal wisata milik China mendarat di kepulauan Paracel yang saat itu masih menjadi wilayah sengketa antara China dan Vietnam.

November 2013: China mengumumkan wilayah udara diatas pulau Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah udara yang berada dalam kedaulatan wilayah udara milik China.

Januari 2014: Wilayah provinsi Hainan, China, mengumumkan peraturan baru bahwa kapal-kapal yang bukan berasal dari China harus mendapat izin China terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah di kawasan Laut China Selatan

April 2014: Foto satelit menangkap kegiatan China melakukan kegiatan reklamasi menimbun kawasan *Mischief Reef* menjadi sebuah pulau baru. Kegiatan ini dimaksudkan China untuk menguatkan klaimnya atas wilayah kawasan Laut China Selatan, namun peraturan didalam UNCLOS tidak membenarkan sebuah pulau reklamasi menjadi sebuah patokan wilayah kedaulatan laut sebuah negara

UNCLOS menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*
2. *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*
3. *3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*(Part VII Regime of Islands , 1982)

## What makes an island?

### Maritime rights under UNCLOS

**Territorial water:** Sovereignty of the airspace above and the seabed below for 12 nautical miles

**Exclusive Economic Zone (EEZ):** Gives a state exclusive rights to exploit resources within 200 nautical miles

**International waters:** High seas beyond national jurisdiction



Landmass above water that can sustain human habitation or economic life on its own  
**Maritime rights:** Territorial water plus EEZ



Low-tide elevation: Landmass above water only at low tide  
**Maritime rights:** None



Land permanently above water but unable to sustain habitation or economic life on its own  
**Maritime rights:** Territorial water, no EEZ



Reclaimed land is not considered an island under UNCLOS, only "naturally formed ones"  
**Maritime rights:** None

Sources: Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), UNCLOS

## Figure 3.2 Jenis-Jenis Pulau Teritorial

May 2014: China menempatkan alat pengebor minyak milik China National Petroleum di kawasan kepulauan Paracel, hal ini membangkitkan gerakan anti-China di Vietnam sehingga mengganggu kegiatan ekonomi kedua negara. Belakangan China menarik kembali alat pengebor minyak tersebut pada bulan July.

Oktober 2014: Taiwan melaporkan adanya kunjungan panglima angkatan laut China, Wu Shengli ke lima pulau reklamasi di kepulauan Spratly untuk memastika perkembangan di pulau tersebut, diketahui bahwa pulau-pulau tersebut akan dibangun menjadi pangkalan militer China sebagai upaya monitor China di kawasan Laut China Selatan.

November 2015: Menteri luar negeri China menuduh Filipina telah melanggar *code of conduct* yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN tahun 2002. Tuduhan ini menjadi alasan mengapa China memilih untuk absen di pengadilan arbitrase di Den Haag.

Februari 2016: Foto satelit menangkap kegiatan China melakukan perluasan *Tree Island* dan *North Island* di kawasan kepulauan Paracel

Juni 2016: Negara-negara di Asia Tenggara mulai bereaksi terhadap tindakan China yang dianggap telah sangat keterlaluan

dalam mengklaim kawasan Laut China Selatan, dalam pertemuan tahunan ASEAN, negara-negara tersebut menyatakan konflik Laut China Selatan telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh anggotanya. Pada bulan ini juga Indonesia menindak perahu berbendera China yang memasuki kawasan Laut Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan laut milik Indonesia

Juli 2016: China mendiskreditkan keputusan pengadilan arbitrase yang memenangkan Filipina atas wilayah Laut China Selatan. China mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat mengikat dan China tidak memiliki keharusan untuk mematuhi keputusan tersebut. (Lockett, 2016)

## **B. Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut China Selatan**

Amerika Serikat, meskipun berstatus sebagai negara non-klaim, telah terlibat beberapa kali dalam konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Meskipun tidak memiliki hak klaim atas wilayah Laut China Selatan, namun Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan ekonominya tetap berlangsung. Sebesar 1,7 miliar USDollar atau setara 23 triliun Rupiah nilai perdagangan Amerika Serikat berlangsung di jalur perdagangan Laut China Selatan.

Keterlibatan Amerika Serikat bukan hanya terjadi belakangan, tahun 2001 sebuah pesawat tempur Amerika Serikat menembak jatuh pesawat tempur China di wilayah udara internasional di atas Laut China Selatan. Kejadian tersebut menewaskan seorang pilot pesawat China dan membuat China memaksa pesawat Amerika Serikat tersebut untuk mendarat dan menahan pilot yang menerbangkan pesawat itu. Hal ini menandai perseteruan antara Amerika Serikat dan China mengenai wilayah Laut China Selatan. (Harres, 2015)

Kemudian, pada tahun 2011, setelah Hillary Clinton yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu mengumumkan program "*pivot to Asia*", keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut mulai intens terjadi. Pada April

2012, Amerika Serikat memulai operasi militer gabungan dengan Filipina setelah China melakukan kegiatan ilegal di wilayah Scarborough. Operasi gabungan ini mendapat respons keras dari China, Wakil Menteri Luar Negeri China, Fu Ying, mengatakan bahwa latihan militer gabungan yang dilakukan Filipina telah memasuki wilayah integral China, padahal wilayah Scarborough tercatat masih termasuk wilayah laut internasional. (Xinhua News Agency, 2012)

Pada November 2013, setelah China mengumumkan bahwa wilayah udara di atas pulau Senkaku/Diaoyu telah berada dibawah kedaulatan China, Amerika Serikat mengirimkan dua pesawat tempur keatas wilayah tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetes keseriusan China atas klaimnya di wilayah udara tersebut. (Harres, 2015) Konfrontasi yang dilakukan Amerika Serikat ini merupakan bentuk nyata ketidaksetujuan Amerika Serikat atas keberhasilan China mengklaim wilayah tersebut, dan mungkin merupakan sebuah sinyal yang dikirim Amerika Serikat jika China masih meneruskan upayanya merealisasikan perluasan wilayah di Laut China Selatan itu.

China juga diketahui telah menjadikan beberapa pulau di kawasan Laut China Selatan menjadi pangkalan militer. Diantaranya adalah pulau Fiery Cross Reef pada April 2015, pulau Johnson South Reef pada Mei 2015, dan juga pembangunan terbesar di Mischief Reef dan Subi Reef pada September 2015. Pulau-pulau kecil lain seperti Gaven Reef dan Hughes Reef juga termasuk kedalam pulau-pulau yang dijadikan China sebagai lokasi yang dimiliterisasi. (Asia Maritime Transparency Initiative, 2016). AMTI yang merupakan salah satu think tank Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pada akhir tahun 2016, seluruh pembangunan pulau-pulau tersebut telah dirampungkan oleh China.

Tindakan China memiliterisasi pulau-pulau tersebut merupakan sebuah langkah untuk mengamankan wilayah yang juga menjadi wilayah kedaulatan negara Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina tersebut. Amerika mengkritik keras aksi China itu dan menyatakan bahwa wilayah tersebut seharusnya merupakan wilayah *restrict free* karena merupakan jalur

perdagangan penting di kawasan Asia-Pasifik. China membantah tuduhan bahwa mereka telah memiliterisasi kawasan tersebut, dan balik mengecam Amerika Serikat yang meluncurkan kapal perangnya sejauh 12 mil laut dari wilayah yang menjadi permasalahan itu.

Amerika Serikat secara formal juga telah menyatakan tidak akan mengakui *nine-dash line* milik China lewat pernyataan tertulis *U.S States Department* pada tanggal 7 Desember 2014. Bahkan, mengutip pernyataan Ashton Carter yang menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat; "*Nothing will stop US military operations at all. We will fly, we will sail, we will operate here in the Pacific as we always have.*". Pernyataan ini mendukung argumen bahwa konfrontasi-konfrontasi yang dilakukan Amerika Serikat merupakan sinyal agar menghentikan upaya perluasan wilayah di Laut China Selatan.

### C. Dukungan Amerika Serikat Terhadap Filipina Dalam Konflik Laut China Selatan

Setelah habis masa kepemimpinan Obama, Donald Trump yang menggantikannya juga telah bersumpah untuk tetap melindungi *interest* Amerika Serikat di Laut China Selatan sehari setelah menjabat sebagai presiden pada tanggal 23 Januari 2017. Mengutip pernyataan Rex Tillerson yang menjadi calon sekretaris negara Amerika Serikat; "*It's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country.*". (Reuters, 2017)

Amerika Serikat dan Filipina memiliki sejarah hubungan yang sangat panjang dan kompleks, dimulai dari pendudukan Amerika Serikat atas Filipina pada tahun 1898 ketika Amerika Serikat memenangi *Spanish-American War*, kuasa Spanyol atas Filipina berpindah ke tangan Amerika Serikat. Selama 3 tahun dibawah pendudukan Amerika Serikat, rakyat Filipina melakukan beberapa usaha memerdekakan diri namun dapat diredam oleh Amerika Serikat. Kemudian dari tahun 1902

Amerika Serikat memegang kendali atas pemerintahan Filipina, hingga pada tahun 1935 diadakan pemilu presiden.

Manuel Quezon muncul sebagai pemenang pemilu dan terpilih menjadi presiden *Commonwealth of the Philippine*, sebuah negara persemakmuran dibawah kendali Amerika Serikat. Jepang datang dan menduduki Filipina dari tahun 1941-1945, segera setelah Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia II, Filipina mendapatkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat pada tahun 1946. (Albert, *The U.S.-Philippines Defense Alliance*, 2016)

Presiden Filipina Manuel Roxas dan Dubes Amerika Serikat untuk Filipina, Paul McNutt menandatangani *Military Base Agreement* pada Maret 1947. Perjanjian tersebut menjamin akses bagi Amerika Serikat untuk membangun seluruh pangkalan militer di Filipina. Selama *Cold War* berlangsung, Filipina merupakan basis utama Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 1951 kedua negara menandatangani *Mutual Defence Agreement* dan setelahnya lebih dari 30,000 personil angkatan bersenjata Amerika Serikat ditempatkan di Filipina untuk mengamankan wilayah Asia-Pasifik dari pengaruh komunis USSR.

Namun hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus, pada tahun 1992, gerakan anti-A.S muncul dan memaksa senat Filipina memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Kemunculan gerakan anti-A.S tersebut dikarenakan adanya perbedaan paham antara kedua negara. Ketika itu Filipina hendak mengembangkan proyek nuklirnya namun Amerika Serikat sebagai pemegang kontrol atas program *non-proliferation* tidak menyetujui jika Filipina mengembangkan proyek nuklir tersebut. Meskipun proyek nuklir tersebut tidak berhasil disetujui dalam voting *House* Filipina, tetapi gerakan anti-A.S telah menyebar ke seluruh Filipina (U.S Library of Congress, 1991)

Setelah pada tahun 1998 kedua negara menandatangani *Visiting Forces Agreement*, hubungan Amerika Serikat dan Filipina kembali membaik. Setiap tahunnya Amerika Serikat mengadakan latihan militer gabungan dengan Filipina,



memperjelas bahwa kerjasama antara kedua negara sekarang adalah kerjasama *shoulder-to-shoulder* seperti yang tertuang dalam *Visiting Forces Agreement* tersebut. Setelah Amerika Serikat mengumumkan *war on terrorism* tahun 2001, hubungan dengan Filipina semakin membaik karena Amerika Serikat turut membantu Filipina menumpas militan Abu Sayaf yang berbasis disana. (Albert, *The U.S-Phillipines Deffense Alliance*, 2016)

Filipina pun kembali menjadi sekutu Amerika Serikat dan basis utamanya di kawasan Asia-Pasifik. Tahun 2012, ketika konflik antara China dan negara-negara di sekitar kawasan tersebut memanas, Amerika Serikat yang telah “memarkir” persenjataannya di Filipina mulai melakukan konfrontasi lewat patroli-patrolinya untuk menentang tindakan China dalam mengklaim kawasan laut yang penting bagi Amerika Serikat dan sekutunya tersebut.

